

# **BAB 16**

## **ASAS DAN LANDASAN PERJUANGAN NU**

**BAGI** suatu organisasi khususnya organisasi yang bernafaskan keagamaan semacam NU sudah barang tentu dalam kiprahnya mempunyai asas dan landasan perjuangan yang kuat dan ampuh. Karena pada dasarnya ia akan berhadapan dalam masyarakat yang plural (majemuk). Oleh karena itu, apapun alasan yang dibuatnya, maka ia harus, mempunyai asas dan landasan yang konkrit dan dapat dipahami oleh semua anggotanya secara khusus, dan orang lain secara umum.

Menyadari hal demikian, NU sebagai organisasi keagamaan sadar akan adanya asas dan landasan yang harus dimiliki sebagai titik awal perjuangannya. Karena itulah pada bab ini akan dibicarakan pokok-pokok pikiran tentang asas Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan landasan perjuangannya.

## A. Asas Jam'iyyah Nahdlatul Ulama

Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 2 (dua) tentang "ASAS" telah dikatakan, bahwa Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila. Pancasila adalah sebagai satu-satunya asas dan dasar menjalankan roda organisasi Nahdlatul Ulama.

Pancasila, bagi NU adalah merupakan rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia sudah tuntas dengan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua

pihak harus memahami memiliki persepsi tentang – dasar Negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam UUD 1945 (vaitu pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya)itu.

Kaum muslimin Indonesia –termasuk Nahdliyin– bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia juga memikul kewajiban memenuhi kesepakatan bersama itu. Mereka menerima dasar Negara Republik Indonesia itu berdasarkan prinsip, bahwa kaum muslimin Indonesia –melalui para pemimpinnya– ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar Negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan, menurut pandangan Islam.

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu, salah besar bagi mereka sampai saat ini kalau mempertentangkannya.

Nahdlatul Ulama yang berhaluan pada aqidah dan syariah Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 –*billafdhi wal ma'namurad*, dengan rasa tanggung jawab dan tawakal kepada Allah serta mengharap ridha-Nya. Karena itulah jam'iyah Nahdlatul Ulama berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi.

Penerimaan NU atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh NU secara matang dan mendalam. NU adalah organisasi kemasyarakatan yang pertama menuntaskan penerimaannya atas Pancasila. Kendati demikian, hal itu bukanlah alasan untuk menuduh

Bawa penerimaan itu karena ia bersikap akomodatif, dan juga tidak benar bahwa kembali NU menjadi organisasi keagamaan atau meninggalkan politik praktis sebagai sikap yang emosional. NU bukanlah hanya menerima, melainkan juga yang paling mudah menerima Pancasila.

Penerimaan NU benar-benar telah dipikirkan dari sudut perimbangan keagamaan. Dalam Muktamar Situbondo ke-27 NU memahami ulang dasar-dasar keagamaannya, dan dari sana merumuskan sikap terhadap perkembangan yang sedang dihadapi-

nya. Dasar-dasar keagamaan paham Ahlussunnah wal Jama'ah dijabarkan sebagai berikut :

*“Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Paham keagamaan yang dia-nut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.”*

Selain pertimbangan keagamaan tersebut, NU juga melihat dari konsep ketuhanan. Dalam hal ini NU menilai rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut pasal 29 ayat I UUD 1945 itu berbunyi : “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Di sini yang dinilai oleh NU adalah kedudukan agama dalam Negara atau hubungan agama dengan Negara. Sebagaimana kita ketahui hubungan antar-agama dengan negara adalah bersifat rumit dan krusial.

Prinsip Ketuhanan yang merupakan pokok perbedaan sengit di antara kalangan nasionalis muslim dan nasionalis sekuler sejak sebelum kemerdekaan diselesaikan secara tuntas oleh NU dengan menyatakan bahwa sila itu mencerminkan tauhid Islam. Mencerminkan berarti membayangkan atau menggambarkan sesuatu perasaan, keadaan, batin dan sebagainya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinilai sudah membayangkan atau menggambarkan apa yang diinginkan oleh tauhid Islam, KH Ahmad Shiddiq yang sejak Muktamar 1983 terpilih sebagai Rois Aam, orang yang boleh dikatakan konseptor utama keputusan Muna 1983 dan muktamar 1984-an dalam makalahnya yang disampaikan pada Muktamar mengatakan:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam akan keesaan, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid.
2. Adanya pencantuman anak kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” pada Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan berbangsa.

Watak kehidupan bangsa Indonesia yang religius yang dibakukan dalam bentuk UUD 1945 –yang sebenarnya merupakan pengejawantahan berbagai tradisi keagamaan– bila disimak lebih dalam tidak jauh berbeda dengan watak NU sebagai organisasi keagamaan yang tradisional khususnya penerimaan NU atas tradisi sufistik, maka dengan mudah NU menerima Pancasila dengan mengutamakan landasan keagamaan. Dengan menerima Pancasila berdasarkan penegasan sikapnya, bahwa watak keagamaan bagaimanapun itu ditafsirkan –sedikit banyak telah memenuhi aspirasi Islam, yaitu segala tindak laku di dalam masyarakat terutama kebijakan- kebijakan politis– akan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai tolak ukur.

Pertimbangan di atas dalam penerimaan Pancasila diperkuat oleh Muktamar –pemahaman sejarah– dengan mengetengahkan peranan umat Islam menentang penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Beberapa pokok pikiran –ketika Muktamar Situbondo– KH Ahmad Shiddiq menegaskan:

1. Perjuangan umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama.
  2. Ketika perjuangan merebut kemerdekaan sudah mendekati keberhasilannya, umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan lahirnya Negara Indonesia merdeka. Melalui para pemimpinnya, umat Islam ikut menentukan wujud, asas dan hukum Negara yang akan lahir itu.
  3. Setelah Negara Republik Indonesia diproklamirkan, umat Islam tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu, bukan saja sebagai kewajiban nasional, melainkan juga sekaligus sebagai kewajiban agama.
  4. Ketika revolusi fisik telah selesai, umat Islam memberikan sa-

ham pula dalam pengisian kemerdekaan yang dicapai dengan penuh pengorbanan itu. Keikutsertaan umat Islam itu terbukti dalam dua jenis kerja besar :

- a. Umat Islam berhasil turut menjaga keutuhan Negara dari gangguan gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan-pemberontakan bersenjata.
- b. Dalam era Orde Baru, umat Islam turut mengisi kemerdekaan dalam bentuk partisipasi penuh dalam pembangunan nasional yang sudah berlangsung dewasa ini.

Demikianlah Pancasila diterima Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang, sebagai salah satu asas dan dasar dalam menjalankan program-program NU itu sendiri. Dan sudah barang tentu sebagai konsekuensi yang logis setelah Muktamar Situbondo 1984 –seluruh warga Nahdliyin menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

## **B. Landasan Perjuangan Nahdlatul Ulama**

Sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar. Nahdlatul Ulama pasal 3 (tiga) tentang “Aqidah”, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut paham ahlussunnah wal jama'ah dan mengikuti salah satu mazhab empat.

Sedangkan dalam pasal 4 (empat) tentang “Tujuan” dikatakan, bahwa berlakunya ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah dan mengikuti salah satu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa landasan perjuangan Nahdlatul Ulama adalah agama Islam berhaluan ahlussunnah wal jama'ah serta ikut mempertahankan dan melaksanakan falsafah dan dasar Negara Pancasila dan UUD 1945.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah bergerak dibidang pendidikan 'sosial' pererangan dan penyiaran agama Islam, dengan tujuan menegakkan syariat Islam menurut haluan ahlussunnah wal jama'ah dengan mengikuti salah satu mazhab empat, serta mengusahakan berlakunya ajaran agama Islam berhaluan ahlussunnah wal jama'ah dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rangka kehidupan bernegara di lingkungan wilayah negara Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama berjuang dengan landasan UUD 1945 dan mengamalkan serta melaksanakan falsafah dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Dengan landasan dasar dan perjuangan tersebut di atas Nahdlatul Ulama dengan rasa tanggung jawab, berusaha dan beramal ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan agama Islam yang diridhai Allah SWT, dan ikut serta membangun negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan perjuangan NU sangat erat sekali dengan asas Nahdlatul Ulama sebagaimana yang disebutkan dalam Bab II pasal 4 (empat). Oleh karena, itu untuk memantapkan landasan perjuangan tersebut, maka pada Muktamar NU ke-28 di Krupyak Yogyakarta tanggal 25-28 November 1989. NU telah menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan program 5(lima) Tahun NU 1989 – 1994. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Muktamar No. 05/MNU-28/1989, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum jam'iyah NU adalah suatu haluan jam'iyah dalam garis besar sebagai pernyataan dari kehendak jamaah yang pada hakikatnya adalah Pola Dasar Perjuangan –khiththah– dan Pola umum Pengembangan Nahdlatul Ulama yang ditetapkan oleh Muktamar NU.
  2. Pola Dasar Perjuangan NU –Khitthah– merupakan landasan historis spiritual diejawantahkan dalam setiap upaya pengembangan NU. Pola Umum Pengembangan NU merupakan rangkaian program-program pengembangan yang menyeluruh, ter-

arah, terpadu yang berlangsung secara kontinyu.

3. Rangkaian program pengembangan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan NU menegakkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian dapat dicapai, "izzul Islam wal muslimin", dalam satuan tatanan "Bal-datun Thayyibatun warabbun ghafur" (Alqur'an).

Karena itu, landasan Kebijaksanaan Umum Jam'iyah NU disusun berdasarkan:

1. Landasan Perjuangan Islam.
  2. Landasan Idiil Kenegaraan.
  3. Landasan Konstitusional.
  4. Landasan Struktural Organisasi Keputusan Konferensi Besar No. IVKONBES/1408 H/1987M.

Dengan landasan dasar dan perjuangan tersebut di atas, Nahdlatul Ulama dengan rasa tanggung jawab, berusaha dan beramal ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan agama Islam yang diridhai Allah SWT. Dan ikut serta membangun Negara kesatuan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur-adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan –yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ||